



# Optimalkan Pengawasan Pajak

## Midji Berharap BPKP dan BPK Sejalan

**PONTIANAK** - Gubernur Kalbar, H Sutarmidji mengharapkan kerjasama bidang pengawasan yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Kalbar ke depan dapat ditingkatkan.

Harapan itu diungkap-

kannya ketika menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar dari Raden Suharto kepada Didik Sadikin, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (11/2). "Saya ucapkan kasih atas kerja sama selama ini," ungkap Gubernur.

Dalam sertijab kali ini, Gubernur H Sutarmidji meminta BPKP dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ia pun sangat optimistis ke depan tata kelola Pemerintahan Provinsi Kalbar terutama tata kelola keuangan akan ada perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan.

"Saya sangat optimis sekali, tata kelola keuangan Pemprov Kalbar ke depan akan ada perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan," ujarnya.

Selain itu, Midji juga berharap hasil audit BPK dan BPKP bisa sejalan. "Saya minta jajaran Pemprov Kalbar jangan ulangi cara penyusunan anggaran yang tidak benar," pintanya.

■ Bersambung ke hal. 10





## Optimalkan Pengawasan Pajak

Sambungan Hal.9

Disamping itu pula, Midji meminta BPKP agar dapat membenahi permasalahan aset Pemprov Kalbar. Ia juga menyinggung terkait pembayaran pajak. Dirinya mengatakan hanya Pertamina yang membayar pajak kendaraan motor.

"Bagi yang tidak membayar kita akan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP menangani itu. Saya ambil contoh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang bayar hanya Pertamina dan yang lain tidak punya data yang baik, padahal dia pemasok," ujarnya.

Ia berharap ini menjadi perhatian dan nanti dirinya akan mengajak aparat penegak hukum untuk pengawasan hal itu.

Beberapa waktu lalu Midji mengatakan banyak alat berat yang tidak bayar pajak

yang digunakan di perkebunan. "Sebenarnya yang banyak bandel itu adalah dari perkebunan, Mereka yang punya dumtruk 1.000 tapi bayar pajaknya hanya 10 sampai 100 saja," tukas Midji.

Setelah resmi menjabat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Didik Sadikin menyampaikan ke depan BPKP akan fokus pada tiga hal yaitu pengawasan atas tata kelola, penguatan sistem pengendalian intern, dan manajemen risiko.

Ia mengatakan terkait pernyataan Gubernur Kalbar tentang pembayaran pajak yang belum optimal pada pembayaran pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang hanya dibayar oleh Pertamina, maka menurutnya itu bisa dilakukan melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).

"Jadi dilakukan dalam

bentuk intensifikasi dan ekstentifikasi melalui OPAD, tergantung permintaan gubernur. Kalau diminta, Insaa Allah kami bisa tindak lanjuti," ujarnya.

Terkait dengan maturitas atau kepentingan dan kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian interen pemerintah (SPP) dari 1 provinsi 2 kota dan 12 kabupaten yang sudah mencapai maturitas level 3 ada 12 di Kalbar.

"Jadi yang belum Kabupaten Sambas Bengkayang, Kayong Utara serta Melawi.

Kendalanya banyak yakni terkait komitmen kepala daerah dan jajarannya dalam hal penerapan sistem pengendalian intern di sana," tandasnya.

### Tingkatkan Status

Didik Sadikin juga menyampaikan keinginan gubernur untuk meningkatkan status provinsi dari Wajar dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

"Kita tahu provinsi Kalbar masih WDP. Artinya WDP di bawah WTP. Kita juga tahu banyak kabupaten kota di Kalbar masih ada yang WDP. Seperti persoalan gaji yang cuma ada 11 bulan, kenapa itu bisa terjadi. Itu dalam hal penyimpangan aturan tidak sesuai, tapi bukan hal pe nyelewengan," ujarnya.

Kemudian masalah yang menjadi konsen terkait pajak. Ia mengatakan pengawasan itu bukan cuma mencari kesalahan tapi mencari solusi.

"Bukan daftar dosa saja yang dicari, tapi harus mencari solusi. Klau sekadar nyalahkan orang gampang, tapi bagaimana bisa membangun. Maka untuk itu perlu diketahui apa hal yang menjadi kelemahan kita," jelasnya.

Jad sebelumnya harus tahu wilayah yang perlu dikembangkan. Temuan itu sebuah identifikasi dari sesuatu yang bisa diperbaiki.

"Jadi temuan bukan kinerja tapi identifikasi untuk meningkatkan kinerja ketika outcome berkembang temuan hilang lagi karena sudah selesai. Itulah kinerja dari pengawasna yang kita lakukan," ujarnya.

Selain itu dilakukan koordinasi dengan BPK yang merupakan eksternal auditor. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah internal auditor di bawah pemerintah. "Kalau BPK laporan selesai baru diperiksa. Kalau BPKP mengawal dari mulai perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan sampai dengan pertanggungjawaban," jelasnya. (ang)